

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

¹Ni Putu Yulia Paramitha, ²I Made Pradana Adiputra,

Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja Indonesia

e-mail: yuliiaparamitha@gmail.com, adiputraundiksha@gmail.com,

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk memahami pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas *internal controls* dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Observasi yang digunakan yaitu *quantitative research* dengan menggunakan data yang didapat dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara pemerintahan desa dengan total populasi 138 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *saturated sample* dimana sampel merupakan sebuah karakteristik yang mewakili masyarakat dan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara/Kaur Keuangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan IMB SPSS ver. 25.0. Capaian dari riset ini memperlihatkan bahwa *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: efektivitas pengendalian internal, *good corporate governance*, pencegahan kecurangan, *whistleblowing system*.

ABSTRACT

This research aimed to determine empirical evidence about the effect whistleblowing system, good corporate governance and the effectiveness of internal control on fraud prevention in the management of village funds. This is a quantitative research with primary data which collected from questionnaires and measured using likert scale. The populations is the village government with a total population of 138 people. The sampling technique uses saturated sample where the sample is a characteristic that represents the community and the sample used is the village's government organizer consisting of the Village Head, Village Secretary and Treasurer / Head of Finance. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis using IMB SPSS ver. 25.0. The results of this research indicate that whistleblowing system, good corporate governance and the effectiveness of internal control affected positively towards fraud prevention in village fund management.

Keywords: *effectiveness of internal control, fraud prevention, good corporate' governance, whistleblowing system.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan perantara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan bangsa Indonesia. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu

wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa dalam mendorong terlaksananya pembangunan. Guna mendukung pengimplementasian UU Nomor 6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai kebijakan realisasinya, salah satu kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana

desa bertujuan untuk memberi bantuan untuk masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, mendorong kondisi ekonomi masyarakat desa, dan menanggulangi ketimpangan pembangunan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 14). Jumlah anggaran dana mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni sebesar Rp 20,67 triliun di tahun 2015, Rp 46,98 triliun di tahun 2016, serta di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing – masing Rp 60 triliun. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun (Gatra, 2019). Di tahun 2020, besaran alokasi yang dikucurkan pemerintah sebanyak Rp 72 triliun (finance.detik.com, 2020).

Disisi lain, dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya kemungkinan terjadinya aksi kecurangan (*fraud*) yang diakibatkan dari tindakan aparat desa dalam mengelolauang milik desa akan mengalami peningkatan (Hara, 2018). Sepanjang tahun 2015 – 2018 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak 252 kasus korupsi anggaran desa. Dari total 252 kasus korupsi anggaran desa, 214 kasus melibatkan kepala desa. Jumlah kerugian yang dialami Negara dengan adanya banyak skandal menyentuh angka Rp 107,7 miliar (Haryanti, 2019). Hingga sekarang tindakan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa itu sendiri, seperti beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu di Desa Baha dimana Kepala Desa Baha diduga melakukan tindakan korupsi APBDes Tahun Anggaran 2016/2017 yang menyebabkan kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 1 Miliar lebih (Balipost, 2019). Kemudian kasus korupsi dana hibah untuk pembangunan Pura Dalem Kebon yang disalahgunakan oleh *Kelian* Pura Banjar Bedauh, Desa Carangsari yang menyebabkan total kerugian keuangan Negara mencapai Rp 116.453.000 (Balipost, 2019). Dugaan kasus korupsi juga terjadi Desa Dalung dimana terdapat dua dugaan penyimpangan dana APBDes yaitu pembangunan *banjar* dan pembuatan *paving* di Desa Dalung serta pembangunan

tambahan Kantor Desa Dalung. Kasus selanjutnya yaitu terdapat dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana yang terjadi di Kecamatan Abiansema yang sudah berlangsung selama 3 tahun (Nusabali.com, 2017). Kemudian terdapat kasus Korupsi APBDes yang dilakukan oleh mantan Perbekel Mengwitani, sehingga menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 1.227.031.888,06 (Balipost, 2017). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa penipuan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang bahkan beberapa individu jabatan yang bertanggung jawab untuk tatakelola, pekerja, dan pihak lain yang menggunakan sebuah trik untuk menipu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat (Widiyarta, Herawati, & Atmadja, 2017), suatu langkah antisipasi sangat diperlukan untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi. Pencegahan kecurangan menurut (Karyono, 2013) merupakan suatu jalan untuk meminimalkan kesempatan, menangkal, serta menilai setiap aktivitas yang memiliki risiko timbulnya kecurangan. Pelaksanaan *whistleblowing system* dapat dijadikan langkah dalam mencegah terjadinya kecurangan. *Whistleblowing system* dapat dianggap sebagai tempat untuk *whistleblower* untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam sebuah instansi. *Whistleblower* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Namun, risiko yang dihadapi oleh seorang *whistleblower* sangat sulit dihindari, sehingga sebagian besar memilih untuk tidak mengungkapkan penyimpangan yang terjadi (Widyawati, 2019). Penerapan *whistleblowing system* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan (*fraud*). Jika kecurangan (*fraud*) dapat terdeteksi sejak dini maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Jika dikaitkan dengan *Fraud Diamond*

Theory, variabel whistleblowing system berkaitan dengan salah satu elemen *Fraud Diamond Theory* yaitu *opportunity* (Kesempatan). Jika terdapat peluang dalam sebuah lingkungan kerja maka hal tersebut akan memberi kesempatan bagi pegawai untuk bertindak curang (Tunggal, 2011). Upaya deteksi dini yang bisa diterapkan untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan menerapkan *whistleblowing system* dalam organisasi. Apabila dalam penerapan *whistleblowing system* ini dapat berjalan dengan baik maka tindak kecurangan dapat dicegah dalam instansi atau organisasi tersebut. Hal ini searah dengan hasil riset dari (Widyawati, 2019), (Agusyani, Sujana, & Wahyuni, 2016), (Kurniawan, 2019) dan (Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari (Rizqa, 2019) mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan. Bersumber dari konsep teori dan hasil riset terdahulu, maka hipotesis pertama yaitu:

H₁: *Whistleblowing System* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan yaitu penerapan *good corporate governance*. *Variable Good Corporate Governance* identik dengan masalah keagenan, dimana seorang *agent* maupun *principals* sama – sama memiliki rasionalitas ekonomi sehingga segala tingkah laku terjadi karena keinginan pribadi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan yaitu dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. Menurut (Arfah, 2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut menerapkan manajemen usaha yang baik secara konsisten dan menyeluruh. Menurut Sahari dan Kuniawan (2007) manajemen *good corporate governance* dirancang untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Apabila prinsip – prinsip dasar dari *good*

corporate governance direalisasikan akan dapat menangkai terjadinya *fraud* karena asas yang dimiliki *good corporate governance* menyangkut mengenai keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan control masyarakat (Karyono, 2013). Hal ini searah dengan hasil riset dari (Islam, 2018), (Jannah, 2016), dan (Rowa & Arthana, 2019) mengindikasikan bahwa implementasi *gcg* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset yang ditunjukkan dalam oleh (Patriarini, 2018) mengindikasikan bahwa implementasi *good corporate governance* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan (*fraud*). Bersumber dari konsep teori dan hasil riset terdahulu, maka hipotesis kedua yaitu:

H₂: *Good Corporate Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Keefektifan pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan. Jika *internal control* rendah, maka dapat memicu terjadinya kecurangan (Lubis, 2016). *Internal control* dalam menghalau *fraud* menurut COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) (1992) dikutip dari (Tuanakotta, 2010) adalah sebuah sistem tentang alur yang memiliki tujuan tertentu untuk mencapai tujuan awal agar dapat mencegah *fraud*. Variabel Efektivitas Pengendalian Internal jika dikaitkan dengan *Fraud Diamond Theory* berkaitan dengan elemen *Opportunity* (Peluang atau kesempatan). Kesempatan atau peluang kemungkinannya timbul karena *internal control* yang rendah, tatanan yang kurang dalam pengawasan, atau menggunakan jabatan untuk memudahkan dalam melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi. Bersumber dari konsep teori dan hasil riset terdahulu, maka hipotesis ketiga yaitu:

H₃: Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan

Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan *quantitative* dengan data primer yang berasal dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala *likert* dan dianalisis dengan menggunakan program IBM SPSS ver. 25.0.

Dalam riset ini populasinya adalah penyelenggara pemerintahan desa dengan total populasi 138 orang. Riset ini menggunakan teknik *nonprobability sampling (saturated sample)* dimana sampel merupakan sebuah karakteristik yang mewakili masyarakat dan pada riset ini yang dipakai sebagai *sample* adalah penyelenggara pemerintah desa meliputi Kades, Sekdes dan Bendahara/Kaur Keuangan.

Instrumen dalam riset ini berbentuk kuesioner yang didistribusikan kepada 138 responden. Dalam butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner terdapat lima alternatif jawaban dimana (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju. Elemen pernyataan kuesioner *whistleblowing system* menggunakan instrument penelitian yang dikembangkan oleh (Semendawai, 2011), sementara itu butir pernyataan kuesioner *good corporate governance* menggunakan instrument penelitian yang dikembangkan oleh (Sukmadiansyah, 2015), dan butir pernyataan kuesioner efektivitas pengendalian internal diadaptasi dari (COSO, 2013) dan (Kristiana, 2017).

Untuk menguji instrument penelitian dilakukan beberapa pengujian seperti uji *statistic* deskriptif, uji *validity* dan uji *reliability*. Dalam penganalisisan data dengan uji *classic assumption* yang meliputi uji *normality*, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk menguji hipotesis dengan *multiple linear regression analysis* yakni uji t dan *coefficient of determination (R²)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya kuesioner yang disebar 138 buah. Jumlah kuesioner yang diterima sebanyak 138 buah dan dapat diolah secara keseluruhan.

Syarat minimum suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai Sig. (*2-tailed*) < 0,05 dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka instrument dikatakan valid. Hasil uji instrumen validitas seluruh variabel diketahui bahwa nilai Sig. (*2-tailed*) dibawah nilai α (0,05) dan *Pearson Correlation* bernilai positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Hasil uji instrument *reliability* yang diperoleh untuk variabel *whistleblowing system* adalah 0,815, untuk variabel *good corporate governance* 0,855, untuk variabel efektivitas pengendalian internal 0,885, dan untuk variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa 0,843. Dikarenakan keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 maka instrument penelitian dinyatakan reliabel.

Sasaran dari Uji *normality* yaitu menguji model regresi *independent variable* dan *dependent variable* jika kedua variabel berdistribusi normal atau mendekati normal dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		138
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.16201934
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.032
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Capaian ini mengindikasikan

bahwa ukuran signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka kesimpulannya adalah populasi berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Whistleblowing System (X_1)	.989	1,011
2	Good Corporate Governance (X_2)	.708	1,412
3	Efektivitas Pengendalian Internal (X_3)	.709	1,411

Sumber: data primer diolah, 2020

Capaian uji *multicollinearity* mengindikasikan bahwa *output* nilai VIF seluruh *variable* bebas memiliki nilai dibawah 10 yang artinya tidak adakorelasi antar variabel bebas. X_1 mempunyai VIF sebesar 1,011 < 10 dan

tolerance 0,989 > 0,10. X_2 mempunyai VIF sebesar 1,412 < 10 dan *tolerance* 0,708 > 0,10. X_3 mempunyai VIF sebesar 1,411 < 10 dan *tolerance* 0,709 > 0,10. Sehingga tidak terjadi *multicollinearity*.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.372	4.442		.759	.449
T_X1	.024	.071	.029	.340	.734
T_X2	.014	.054	.027	.264	.792
T_X3	-.035	.057	-.063	-.619	.537

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: data primer diolah, 2020.

Terjadinya heterokedastisitas ditunjukkan apabila nilai signifikan variabel bebas < 0,05. Bersumber pada tabel 3, besaran signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Variabel X_1 memiliki nilai

signifikansi 0,734 yang lebih besar dari 0,05 ($0,734 > 0,05$). Variabel X_2 memiliki nilai signifikansi 0,792 yang lebih besar dari 0,05 ($0,792 > 0,05$). Variabel X_3 memiliki nilai signifikansi 0,537 yang lebih besar dari

0,05 (0,537 > 0,05). Hasil tersebut berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.557	.547	4.208	2.085

a. Predictors: (Constant), T_X3, T_X1, T_X2

b. Dependent Variable: T_Y

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasar pada *table* 4, didapat besaran Durbin-Watson (d) adalah 2,085. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai durbin Watson *table* pada signifikansi 5%. Berdasarkan *durbin Watson table*, nilai dari dL sebesar 1,6778 dan dU sebesar 1,7665. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,085 melebihi batas

(dU) yaitu 1,7665 serta dibawah (4-dU) 4-1,7665 = 2,2335. Maka bersumber dari landasan dalam pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson yaitu $dU \leq d \leq (4-dU) = 1,7665 \leq 2,085 \leq 2,2335$, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	.557	.547	4.208

a. Predictors: (Constant), T_X3, T_X1, T_X2

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan luaran analisis koefisien determinasi yang ditunjukkan *adjusted R Square* sebesar 0,547. Artinya, dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa mampudijelaskan oleh *whistleblowing*

system, good corporate governance, dan efektivitas pengendalian internal sebanyak 54,7% sedangkan sebanyak 45,3% dijelaskan oleh variabel lain selain jenis penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.097	7.141		.294	.769
T_X1	.310	.114	.157	2.720	.007
T_X2	.371	.086	.294	4.301	.000
T_X3	.681	.091	.511	7.476	.000

a. Dependent Variable: T_Y

Sumber: data primer diolah, 2020

Sasaran dari Uji t agar mengetahui besaran signifikan yang dimiliki oleh *variable independent* kepada *variable dependent* dengan memberi anggapan bahwa *variable lain constant*. Jika nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel *independent*

(X) kepada variabel *dependent* (Y) atau hipotesis diterima. Berdasarkan tabel 6, pada variabel X₁ diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,007 < 0,05, pada variabel X₂ diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05, kemudian pada variabel X₃ diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05 maka

H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil tersebut merefleksikan jika variabel *whistleblowing system, good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang searah antara kepada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Bersumber dari tabel 6, pada variabel X_1 diperoleh nilai signifikansi (Sig.) $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berdampak *positive* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Whistleblowing system memiliki kaitan dengan Teori *Fraud Diamond*, dimana seperti yang kita ketahui *Fraud Diamond Theory* berkaitan dengan kecurangan. *Fraud Diamond Theory* menyatakan bahwa terdapat empat elemen yang mendorong seseorang ingin melakukan aksi kecurangan yaitu terdapat *pressure, opportunity*, rasionalisasi dan kemampuan. Dalam penelitian ini elemen *Opportunity* (Peluang atau kesempatan) berkaitan dengan variabel *Whistleblowing System*. Jika terdapat peluang dalam sebuah lingkungan kerja maka hal tersebut akan memberi kesempatan bagi pegawai untuk bertindak curang (Tunggal, 2011).

Hubungan antara *whistleblowing system* dengan pencegahan kecurangan adalah semakin tinggi *whistleblowing system* maka akan berdampak pada meningkatnya *fraud prevention*. Hal ini dibantu beberapa konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Apabila *whistleblowing system* diimplementasikan dengan baik maka akan dapat menjadi alat pencegahan yang baik pula (Mark Zimbelman, 2006:114). Penerapan *whistleblowing system* dipercaya mampu meningkatkan upaya dalam pencegahan kecurangan, dalam hal ini pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Widiyarta et al., 2017). Sasaran dari system ini adalah menyingkap kegiatan yang menyalahi aturan yang menimbulkan kerugian bagi instansi (Nugroho, 2015).

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Bersumber dari tabel 6, pada variabel X_2 diperoleh nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* berdampak *positive* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Good Corporate Governance memiliki koneksi dengan masalah keagenan, dimana seorang *agent* maupun *principals* sama – sama memiliki kesadaran ekonomi sehingga segala perlakuannya terjadi karena motivasi yang timbul dari keinginan sendiri.

Untuk membuat *good corporate governance* bekerja secara semestinya, ada beberapa kelompok yang berkaitan satu sama lain seperti jaminan hukum berupa undang-undang yang baik, penegakan *accountability*, terdapat pembagian tugas yang jelas (Sutedi, 2011).

Menurut Sahari dan Kuniawan (2007) rangkaian *good corporate governance* disusun untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. *Good corporate governance* adalah sebuah acuan dasar untuk mengelola sebuah instansi secara *transparent, accountable*, dan *fair* sesuai dengan etika yang berlaku. Asas dasar dari *good corporate governance* apabila dapat diimplementasikan akan membantu mengatasi kecurangan (*fraud*) karena prinsip-prinsip dari *good corporate governance* menyangkut mengenai keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan control masyarakat (Karyono, 2013).

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 6, pada variabel X_3 diperoleh nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal berdampak *positive* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Efektivitas Pengendalian Internal jika dikaitkan dengan *Fraud Diamond Theory* berkaitan dengan elemen *Opportunity* (Peluang atau kesempatan). Kesempatan

atau peluang kemungkinan timbul karena *internal control* yang rendah, tatanan yang kurang dalam pengawasan, atau menggunakan jabatan untuk memudahkan dalam melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi.

Internal Control merupakan langkah awal dalam pencegahan kecurangan (Tuanakotta, 2012). Keefektifan pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan. Jika *internal control* rendah atau lemah, dapat memicu terjadinya *fraud* (Lubis, 2016). Jika Pengendalian internal berjalan efektif akan dapat mengamankan asset, system manajerial serta pelaporan keuangan akan terjamin dan dapat dipercaya. Jadi, peluang terjadinya kecenderungan *fraud* dikarenakan faktor kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan ini bisa diminimalkan jika pengendalian internal dilakukan secara *effective*. Sehingga untuk dapat menghalau *fraud*, pemerintah desa harus mampu bertanggungjawab untuk mengefektifkan pengendalian internal.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berlandaskan padacapaian riset yang sudah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu *whistleblowing system, good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal berdampak *positive* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

SARAN

Berdasarkan simpulan capaian penelitian, berikut merupakan saran kepada pihak terkait berkaitan dengan keterbatasan dari riset ini, sebagai berikut.

1. Pemerintah desa diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai *whistleblowing system* agar dapat mendeteksi lebih dini terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena keberanian sikap individu akan mempercepat pengungkapan kecurangan. Selain itu, perlunya meningkatkan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa karena pengawasan yang ketat akan memberikan rasa takut bagi

oknum untuk melakukan kecurangan. Perlunya implementasi dari GCG, yang jika diterapkan dengan baik akan memberikan kedisiplinan kerja sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan itu terjadi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah jumlah sampel dalam penelitian dengan tidak hanya menjadikan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara tetapi juga dapat menjadikan seluruh perangkat desa lainnya untuk dijadikan sampel dalam penelitian selanjutnya. Karena pada dasarnya, tindakan kecurangan tersebut dapat dilakukan oleh pihak manapun selama pihak tersebut memiliki beberapa faktor seperti yang tercantum pada *Fraud Diamond Theory* yaitu kesempatan, jabatan, *rationalitation* dan kapasitas untuk melakukannya.
3. Pengukuran variabel *Good Corporate Governance* masih dari segi non pemerintahan desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah teori-teori yang berkaitan mengenai *Good Corporate Governance* dalam perspektif pemerintahan desa.
4. Dalam riset ini terdapat 45,3% variabel independen lain yang bisa mempengaruhi variabel dependen, dengan begitu tentu penelitian ini masih sangat perlu untuk dilanjutkan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan riset dengan menggunakan variabel lain seperti kompetensi dan *organizational culture* karena faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan kecurangan, selain yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat menghasilkan luaran yang lebih variatif sehingga dapat merefleksikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusyani, K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). *Pengaruh Whistleblowing System dan Kompensasi Fraud pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten*

- Buleleng*). 6(3), 1–9.
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi*, 7 (2), 137–153.
- Balipost. (2017). *Bendahara Desa Mengwitani Diadili Kasus Korupsi*. Retrieved from <http://www.balipost.com/news/2017/11/17/28352/Bendahara-Desa-Mengwitani-Diadili-Kasus...htm>
- Balipost. (2019a). *Klian Pura Dalem Kebon Diadili Kasus Korupsi*. Retrieved from <http://www.balipost.com/news/2019/09/10/86769/Klian-Pura-Dalem-Kebon-Diadili...html>
- Balipost. (2019b). *Sidang Korupsi APBDES, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun*. Retrieved from <http://www.balipost.com/news/2019/02/13/68750/Sidang-Korupsi-APBDes,Oknum-Perbekel...html>
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. Durham, North Carolina.
- Gatra, S. (2019). *Total Dana Desa 2019 – 2024 Rp 400 Triliun*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>
- Hara, D. D. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal Kas dan Implementasi Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Cisaat, Desa Babakan, Desa Sukamantri, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu, Desa Sukaresmi dan Desa Sukasari)*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Haryanti, R. (2019). *Sepanjang 2015-2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi di Desa*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>
- Islam, E. S. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan* (Survey pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung). Universitas Pasundan Bandung.
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 200. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p178-191>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp 149,31 Triliun*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>
- Kristiana, W. L. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi, dan Budaya Organisasi, Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sukasada*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kurniawan, I. P. D. (2019). *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis, Kesesuaian Kompensasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan (Fraud) (Studi Kasus pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di Kecamatan Pupuan)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lubis, R. A. (2016). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi Pada RSUD. Dr. Pirngadi Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Patriarini, K. T. (2018). *Pengaruh Peran Auditor Internal, Pengendalian Internal, Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rizqa, R. (2019). *Pengaruh Whistleblowing*

- System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7, No. 2, 122–187.
- Semendawai, A. H. (2011). *Memahami Whistleblower* (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ed.). Jakarta.
- Sukmadiansyah, R. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perum Jamkrida Jawa Barat)*. Universitas Pasundan.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif* (2nd ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Widyawati, S. (2019). *Pengaruh Whistleblowing System, Moralitas Aparat dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung*. Universitas Pendidikan Ganesha.